

Analisis dampak imperialisme dan kolonialisme belanda terhadap struktur sosial dan ekonomi Indonesia

Muhammad Sobih

Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
e-mail: ikisobih@gmail.com

Kata Kunci:

Imperialisme, koloialisme, struktur sosial ekonomi Indonesia.

Keywords:

Imperialism, colonialism, Indonesian socio-economic structure.

ABSTRAK

Artikel ini membahas bentuk-bentuk imperialisme dan kolonialisme yang dilakukan Belanda di Indonesia, serta dampaknya terhadap struktur sosial masyarakat. Kolonialisme Belanda berlangsung dalam berbagai fase, dimulai dari kedatangan VOC sebagai instrumen kolonialisme ekonomi berbasis monopoli perdagangan rempah-rempah, hingga peralihan ke kolonialisme politik dan administratif setelah VOC dibubarkan. Dalam fase selanjutnya, kebijakan seperti Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel) dan Politik Etis mencerminkan transformasi metode kolonial yang semakin sistematis dan mengakar. Berdasarkan

teori imperialisme dari Hobson dan Lenin, kolonialisme Belanda di Indonesia merupakan bagian dari strategi kapitalis global untuk mengakses pasar, bahan baku, dan investasi. Kolonialisme ini juga membawa dampak struktural yang besar terhadap masyarakat Indonesia, termasuk terbentuknya kelas sosial baru, diskriminasi rasial, dan stratifikasi sosial yang tajam. Artikel ini menyoroti bagaimana proses kolonialisme tidak hanya mengeksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja, tetapi juga secara mendalam mengubah tatanan sosial dan budaya masyarakat Indonesia.

ABSTRACT

This article discusses the forms of imperialism and colonialism practiced by the Dutch in Indonesia and their impact on the social structure of society. Dutch colonialism took place in various phases, starting from the arrival of the VOC as an instrument of economic colonialism based on the monopoly of the spice trade, to the transition to political and administrative colonialism after the VOC was dissolved. In the later phase, policies such as the Cultivation System (Cultuurstelsel) and Ethical Politics reflected the transformation of colonial methods that became more systematic and entrenched. Based on Hobson and Lenin's theory of imperialism, Dutch colonialism in Indonesia was part of a global capitalist strategy to access markets, raw materials and investment. It also had a major structural impact on Indonesian society, including the creation of new social classes, racial discrimination and sharp social stratification. This article highlights how the process of colonialism not only exploited natural resources and labor, but also profoundly changed the social and cultural fabric of Indonesian society.

Pendahuluan

Sejarah bangsa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari imperialisme dan kolonialisme Belanda yang berlangsung selama lebih dari tiga abad. Pada awalnya, kedatangan Belanda ke Nusantara didorong oleh kepentingan ekonomi, khususnya



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

untuk menguasai jalur perdagangan rempah-rempah yang sangat bernilai tinggi di pasar Eropa. Namun, seiring waktu, tujuan ekonomi tersebut berkembang menjadi upaya penguasaan politik dan sosial secara menyeluruh. Kolonialisme Belanda membawa dampak besar terhadap struktur sosial masyarakat Indonesia. Sistem sosial yang sebelumnya relatif egaliter dalam berbagai komunitas tradisional berubah menjadi struktur hierarkis yang kaku. Dalam tatanan baru ini, Belanda dan segelintir elit pribumi menempati posisi dominan, sementara rakyat pribumi lainnya berada di lapisan bawah. Akibatnya, muncul ketegangan antar kelompok masyarakat, terbentuknya kelas-kelas sosial baru berdasarkan kedekatan dengan kekuasaan kolonial, serta meluasnya praktik diskriminasi rasial dan sosial. Selain itu, nilai-nilai budaya lokal secara perlahan tergeser oleh norma-norma Barat yang dibawa melalui sistem pendidikan, administrasi pemerintahan, dan kebijakan sosial yang diterapkan oleh penguasa kolonial (Barat, 2024).

Memahami dampak imperialisme dan kolonialisme Belanda menjadi penting untuk menelusuri akar persoalan struktural yang dihadapi Indonesia dalam perjalanan sejarahnya. Dengan menelaah bagaimana struktur sosial dan ekonomi dibentuk dan diwariskan dari masa kolonial, kita dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang dinamika sosial Indonesia modern, serta menemukan jalan untuk memperbaiki ketidakadilan dan ketimpangan yang masih ada. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap pengaruh kolonialisme Belanda terhadap struktur sosial dan ekonomi Indonesia menjadi kajian yang penting dalam rangka membangun kesadaran historis sekaligus memperkuat upaya transformasi sosial di masa depan.

Pembahasan

Bentuk imperialisme dan kolonialisme di Indonesia

Kolonialisme dan imperialisme Belanda di Indonesia merupakan proses panjang yang berlangsung berabad-abad, dengan bentuk, metode, dan tujuan yang berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan ekonomi, politik, dan sosial Belanda di Eropa dan di koloni. Perjalanan kolonialisme Belanda dapat dibagi dalam beberapa fase penting, dari kolonialisme ekonomi berbasis perdagangan hingga kolonialisme administratif berbasis kekuasaan politik dan militer (Pranata et al., 2014).

A. Awal Kedatangan VOC sebagai Alat Kolonialisme Ekonomi

Pada awal abad ke-17, Belanda membentuk Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) pada tahun 1602, sebuah perusahaan dagang besar yang diberi hak istimewa oleh pemerintah Belanda, termasuk hak untuk: Memonopoli perdagangan di wilayah Asia, Membuat perjanjian dengan penguasa lokal, Mendirikan benteng, Mengadakan perang, Mengangkat dan memberhentikan pejabat.

VOC menjadi pionir kolonialisme berbentuk monopoli ekonomi, terutama atas komoditas rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada, yang sangat berharga di pasar Eropa (Basri et al., 2024).

Praktik-praktik kolonial VOC:

Praktik kolonialisme yang dilakukan oleh VOC di Nusantara mencerminkan strategi eksploitasi ekonomi yang sistematis. Salah satu bentuk utamanya adalah monopoli dagang, di mana VOC memaksa kerajaan-kerajaan lokal untuk menandatangani kontrak eksklusif yang mengharuskan mereka hanya berdagang dengan VOC. Kebijakan ini mempersempit ruang gerak perdagangan bebas di Nusantara dan menguntungkan posisi Belanda secara sepihak. Selain itu, VOC juga melakukan eksploitasi terhadap penduduk lokal dengan mewajibkan mereka menjual hasil bumi seperti rempah-rempah hanya kepada VOC, sering kali dengan harga yang sangat rendah, sehingga menekan kesejahteraan ekonomi masyarakat pribumi. Untuk mempertahankan kekuasaan dan mengatasi perlawanan, VOC menerapkan strategi politik *divide et impera* (politik pecah belah), yaitu dengan memanfaatkan pertikaian antarkerajaan lokal dan memperbesar konflik di antara mereka demi kepentingan kolonial. Meskipun awalnya VOC berhasil menguasai jalur perdagangan dan memperluas pengaruhnya (Penerapan & Fifo, 2023).

Namun praktik korupsi internal yang meluas serta biaya besar untuk mempertahankan kekuasaan, terutama dalam bentuk peperangan, menyebabkan perusahaan ini mengalami kemunduran (Ghazali & Daulay, 2006). Akhirnya, pada akhir abad ke-18, VOC dinyatakan bangkrut dan dibubarkan, menandai berakhirnya era kolonialisme korporasi dan awal transisi ke kolonialisme langsung oleh pemerintah Belanda.

B. Masa Pemerintahan Kolonial Dari Kolonialisme Ekonomi ke Kolonialisme Politik

Setelah bubarnya VOC pada tahun 1799, kekuasaan VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda secara langsung. Periode ini menandai pergeseran dari kolonialisme ekonomi menjadi kolonialisme politik dan administratif. Bentuk-bentuk kolonialisme yang diterapkan:

1. Monopoli Perdagangan
 - a. Belanda tetap mempertahankan kontrol perdagangan komoditas penting, termasuk kopi, tebu, nila, dan teh.
 - b. Perjanjian-perjanjian dagang tetap dilakukan, tetapi dengan kekuatan militer yang lebih tegas.
 - c. Pelabuhan-pelabuhan penting seperti Batavia (Jakarta), Semarang, dan Makassar dikendalikan penuh oleh Belanda.
2. Sistem Tanam Paksa (*Cultuurstelsel*)

Sistem Tanam Paksa (*Cultuurstelsel*) adalah kebijakan kolonial Belanda yang diperkenalkan pada tahun 1830 oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch di wilayah Hindia Belanda (sekarang Indonesia) (Sondarika, 2015). Kebijakan ini diberlakukan sebagai upaya untuk mengisi kas kerajaan Belanda yang mengalami krisis keuangan akibat berbagai peperangan di Eropa, termasuk dampak dari Perang Napoleon. Dalam pelaksanaannya, rakyat pribumi dipaksa untuk menyisihkan sebagian dari tanah pertanian mereka biasanya seperlima bagian untuk ditanami tanaman ekspor yang memiliki nilai jual tinggi di pasar internasional, seperti kopi, tebu, nila (indigo), teh, dan

tembakau(Hasibuan, 2018). Hasil dari tanaman ini kemudian harus diserahkan kepada pemerintah kolonial Belanda tanpa kompensasi yang memadai. Praktik ini dilakukan secara sistematis dan melibatkan pengawasan ketat oleh aparat kolonial maupun pejabat lokal yang bekerja sama dengan pemerintah Belanda.

Sistem Tanam Paksa membawa dampak sosial dan ekonomi yang sangat buruk bagi masyarakat Indonesia, khususnya para petani. Mereka kehilangan kendali atas tanah dan hasil pertanian mereka sendiri, serta tidak memiliki kebebasan dalam menentukan tanaman yang akan ditanam. Banyak rakyat yang harus bekerja keras menanam komoditas ekspor, namun tetap hidup dalam kemiskinan karena tidak mendapatkan hasil yang setimpal dari kerja mereka. Di berbagai daerah, kebijakan ini menyebabkan berkurangnya produksi pangan lokal karena lahan-lahan subur dialihfungsikan untuk tanaman ekspor, sehingga menyebabkan krisis pangan, kelaparan, dan penderitaan yang meluas. Selain itu, beban kerja yang berat dan sistem yang eksploitatif membuat rakyat mengalami tekanan fisik dan psikologis. Akibat dari sistem ini juga menimbulkan protes dan kecemasan dari beberapa pihak di Belanda sendiri, yang pada akhirnya mendorong reformasi kebijakan kolonial di kemudian hari.

3. Politik Etis (Ethical Policy)

Politik Etis (Ethical Policy) adalah kebijakan baru pemerintah kolonial Belanda yang secara resmi dideklarasikan pada tahun 1901 sebagai bentuk tanggapan terhadap kritik tajam dari kalangan liberal dan humanis di Belanda mengenai penderitaan yang dialami rakyat Indonesia akibat eksploitasi kolonial, terutama setelah diberlakukannya Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel)(Novriyanto et al., 2023). Kritik ini semakin kuat setelah munculnya karya Multatuli (nama pena dari Eduard Douwes Dekker) berjudul *Max Havelaar* yang membongkar praktik penindasan di tanah jajahan(Erowati & Bahtiar, 2011). Politik Etis didasarkan pada pandangan bahwa Belanda memiliki "utang kehormatan" kepada rakyat Indonesia dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Kebijakan ini diwujudkan dalam tiga program utama yang dikenal sebagai Trilogi Etis, yaitu irigasi, edukasi, dan migrasi(Kurniawan et al., 2022).

Program irigasi berfokus pada pembangunan jaringan pengairan untuk menunjang sektor pertanian, terutama di daerah-daerah pertanian yang penting bagi produksi kolonial. Program edukasi diwujudkan melalui pendirian sekolah-sekolah bagi pribumi, baik dalam bentuk sekolah dasar (seperti Sekolah Rakyat) maupun sekolah lanjutan bagi kalangan elit pribumi, seperti *Hollandsch-Inlandsche School (HIS)* dan *Sekolah Menengah Pertama*(Supriadi, 2003). Sedangkan program migrasi bertujuan memindahkan penduduk dari pulau Jawa yang padat ke wilayah-wilayah lain seperti Sumatra dan Kalimantan untuk membuka lahan-lahan baru, serta mengatasi kepadatan penduduk dan kelangkaan tanah di Jawa.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan Politik Etis tidak sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat pribumi(Spinoza et al., n.d.). Pendidikan yang

disediakan lebih diarahkan untuk mencetak tenaga kerja berpendidikan rendah yang dapat dipekerjakan sebagai pegawai rendahan dalam administrasi kolonial atau sebagai tenaga kerja terampil di sektor perkebunan. Program irigasi dan migrasi juga lebih menguntungkan kepentingan ekonomi Belanda karena membantu meningkatkan produksi perkebunan dan membuka lahan-lahan baru untuk eksploitasi sumber daya alam. Meskipun penuh keterbatasan dan kepentingan tersembunyi dari pihak kolonial, Politik Etis memiliki dampak penting dalam sejarah Indonesia. Salah satu dampak positif utamanya adalah munculnya golongan terpelajar pribumi yang kelak menjadi pelopor dan penggerak pergerakan nasional, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda.

C. Teori Imperialisme dan Konteks Kolonialisme Belanda

Menurut teori imperialisme klasik yang dikemukakan oleh J.A. Hobson (1902) dan diperluas oleh Lenin dalam bukunya *Imperialism: The Highest Stage of Capitalism* (1917) (Lenin, 2013):

1. Imperialisme lahir dari kebutuhan negara-negara kapitalis untuk mencari:
 - a. Pasar baru untuk produk industrinya.
 - b. Daerah investasi yang lebih menguntungkan.
 - c. Sumber bahan baku untuk industri.
2. Belanda melakukan imperialisme di Indonesia untuk:
 - a. Mengamankan pasokan bahan mentah penting.
 - b. Menjadi sumber pasar produk Eropa.
 - c. Mengalirkan keuntungan ke kas negara Belanda.

Konteks ini menjelaskan bahwa kolonialisme dan imperialisme Belanda di Indonesia bukan sekadar upaya penguasaan wilayah, tetapi bagian dari strategi besar mempertahankan kekuatan ekonomi kapitalis di Eropa.

Dampak struktur sosial

Kolonialisme Belanda membawa dampak yang jauh melampaui bidang ekonomi, pengaruhnya juga secara mendalam mengubah struktur sosial masyarakat Indonesia. Sebelum kedatangan kolonialis, masyarakat Indonesia umumnya bersifat komunal, dengan kepemilikan tanah secara kolektif dan otoritas politik yang terdesentralisasi pada kepala adat atau raja lokal. Interaksi sosial lebih egaliter dalam konteks komunitas adat.

Namun, kolonialisme Belanda memperkenalkan sistem sosial baru yang lebih stratifikatif dan hierarkis, menciptakan garis pemisah yang tegas berdasarkan ras, status sosial, dan fungsi ekonomi (Djazilan, 2018). Sejarawan Anthony Reid dalam karyanya *Southeast Asia in the Age of Commerce* mencatat bahwa kolonialisme memperkenalkan sistem kasta sosial baru yang memperdalam jurang ketidaksetaraan di Nusantara (Aulia

et al., 2023). Adapun perubahan besar dalam struktur sosial akibat kolonialisme antara lain:

1. Pembentukan Kelas Sosial Baru

Priyayi Birokrat, Kelompok bangsawan lokal (priyayi) direkrut untuk menjadi birokrat dalam pemerintahan kolonial. Mereka berperan sebagai perantara antara rakyat dengan pemerintah Belanda, memperoleh status sosial dan ekonomi lebih tinggi dibandingkan rakyat biasa (Rodi Wahyudi, 2020). Kelas Buruh dan Petani, Masyarakat bawah semakin termarginalkan dalam struktur kolonial sebagai buruh kasar di perkebunan, pertambangan, dan proyek-proyek kolonial.

2. Diskriminasi Rasial yang Terinstitusionalisasi

Sistem hukum kolonial membagi penduduk ke dalam tiga kategori rasial utama: Eropa (termasuk Belanda dan keturunan Eropa), Timur Asing (Tionghoa, Arab, dan India), dan Pribumi (penduduk asli Indonesia) (Erniwati, 2019).

Hak-hak sosial, politik, dan ekonomi ditentukan berdasarkan klasifikasi ras ini. Misalnya, warga Eropa memiliki akses lebih luas terhadap pendidikan, peradilan, dan jabatan pemerintahan. Pribumi mendapat sedikit hak, dibatasi dalam pendidikan, mobilitas sosial, dan kesempatan ekonomi.

3. Perubahan dalam Pola Pendidikan dan Budaya

Pendidikan Barat diperkenalkan, tetapi sangat selektif. Awalnya hanya anak-anak Eropa dan golongan Timur Asing kaya yang mendapat akses penuh. Pendidikan untuk pribumi berkembang melalui sekolah-sekolah seperti Hollandsch-Inlandsche School (HIS), namun terbatas jumlah dan kualitasnya. Muncul elit intelektual pribumi seperti Sukarno, Hatta, Sjahrir, dan Tan Malaka, yang menggabungkan pendidikan Barat dengan semangat nasionalisme.

4. Pergeseran Budaya dan Orientasi Sosial

Nilai-nilai lokal perlahan tergeser oleh nilai-nilai individualisme, kapitalisme, dan rasionalisme ala Barat. Konsep tanah komunal berubah menjadi kepemilikan individu atau kontrak jangka panjang atas tanah (cultuurstelsel, dan kemudian agrarische wet 1870), memperkenalkan hubungan produksi kapitalistik. Bahasa Belanda menjadi simbol status sosial, sehingga penguasaan bahasa ini menjadi sarana mobilitas sosial baru.

Perubahan sosial yang dibawa kolonialisme Belanda di Indonesia bukan sekadar pergeseran struktur ekonomi, melainkan transformasi fundamental terhadap struktur sosial, budaya, dan pola kekuasaan. Stratifikasi sosial berdasarkan ras dan kelas yang diperkenalkan Belanda meninggalkan warisan panjang dalam dinamika sosial-politik Indonesia, bahkan hingga pascakemerdekaan.

Dampak terhadap ekonomi

Kebijakan ekonomi kolonial Belanda membawa dampak jangka panjang yang kompleks terhadap struktur ekonomi Indonesia. Fokus utama ekonomi kolonial adalah eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja lokal untuk memenuhi kebutuhan pasar dunia dan menyejahterakan Belanda, bukan untuk mendorong pembangunan ekonomi rakyat Indonesia (Tinggi et al., 2024). Akibatnya, model ekonomi yang terbentuk bersifat ekstraktif, tidak berkelanjutan, dan meninggalkan warisan keterbelakangan struktural. Beberapa dampak ekonomi utama yang muncul antara lain:

1. Eksploitasi Besar-besaran atas Sumber Daya Alam

Kolonialisme Belanda di Indonesia sangat berfokus pada eksploitasi hasil bumi seperti rempah-rempah, kopi, tebu, gula, teh, dan minyak bumi yang melimpah di nusantara. Komoditas-komoditas tersebut diekspor ke pasar Eropa dengan harga murah untuk memenuhi kebutuhan dan keuntungan ekonomi Belanda, sementara rakyat Indonesia hanya memperoleh manfaat yang sangat minim dari kekayaan alam mereka sendiri (Ridhoi, 2021). Eksploitasi ini mencapai puncaknya melalui penerapan *cultuurstelsel* atau sistem tanam paksa pada abad ke-19, di mana petani pribumi diwajibkan menanam tanaman ekspor tertentu di sebagian lahan mereka. Kebijakan ini tidak hanya membebani rakyat secara ekonomi, tetapi juga mengorbankan produksi pangan lokal, yang sering kali menyebabkan kelaparan dan penderitaan di berbagai wilayah.

2. Kemiskinan Struktural dan Krisis Sosial

Sistem tanam paksa yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda menyebabkan petani kehilangan kendali atas tanah dan hasil produksi mereka sendiri (Nurcahyanti, 2023). Sebagian besar lahan pertanian dialokasikan untuk menanam komoditas ekspor seperti kopi, tebu, dan nila, sehingga mengurangi ketersediaan lahan untuk tanaman pangan yang dibutuhkan masyarakat setempat. Akibatnya, banyak daerah mengalami kelaparan, penurunan kesejahteraan, dan kerusakan terhadap tatanan ekonomi pedesaan yang sebelumnya lebih mandiri. Sejarawan Onghokham mencatat bahwa sistem tanam paksa ini tidak hanya menciptakan penderitaan jangka pendek, tetapi juga memperkuat ketimpangan sosial-ekonomi dan meninggalkan warisan kemiskinan struktural yang membelenggu kehidupan rakyat Indonesia hingga jauh setelah masa penjajahan berakhir.

3. Keterbelakangan dan Hambatan terhadap Industrialisasi Lokal

Pemerintah kolonial Belanda secara sengaja menghambat pertumbuhan industri manufaktur di Indonesia guna mempertahankan dominasi ekonomi Eropa atas wilayah jajahannya. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa Indonesia tetap berperan sebagai pemasok bahan mentah bagi industri-industri di Eropa, sekaligus menjadi pasar konsumen bagi barang-barang jadi yang diproduksi di sana. Dengan demikian, struktur ekonomi kolonial dibuat sedemikian rupa agar menciptakan ketergantungan permanen terhadap produk asing. Tidak terdapat upaya serius dari pihak kolonial untuk membangun industri pengolahan lokal ataupun mendorong inovasi teknologi di kalangan rakyat pribumi. Akibatnya,

perkembangan ekonomi Indonesia menjadi terhambat, dan warisan ketergantungan ini masih terasa bahkan hingga masa pascakemerdekaan.

4. Ketergantungan Ekonomi yang Sistemik

Pola hubungan ekonomi yang dikembangkan selama masa kolonial Belanda bersifat dependent, di mana Indonesia berperan sebagai pengeksport bahan mentah seperti hasil pertanian dan tambang, serta sebagai pengimpor barang jadi dari Eropa. Pola ini menciptakan ketergantungan struktural yang sulit diatasi bahkan setelah Indonesia meraih kemerdekaan. Model ekonomi yang berbasis pada ekspor bahan mentah ini tidak hanya memperlambat proses industrialisasi nasional, tetapi juga memperpanjang periode keterbelakangan ekonomi yang diwariskan dari masa kolonial.

Dalam konteks ini, teori ketergantungan (Dependency Theory) yang dikemukakan oleh Andre Gunder Frank menjadi kerangka analisis yang relevan. Frank menjelaskan bahwa negara-negara bekas koloni cenderung tetap terjebak dalam struktur ketergantungan ekonomi global yang timpang, di mana kemajuan ekonomi negara-negara maju justru ditopang oleh eksploitasi dan keterbelakangan negara-negara berkembang. Kasus Indonesia menjadi contoh konkret dari argumen Frank, di mana ketidakberdayaan ekonomi lokal saat ini tidak dapat dilepaskan dari warisan struktur kolonial yang tidak pernah sepenuhnya dirombak atau dibongkar pascakemerdekaan (Emeh, 2012).

Kesimpulan

Kolonialisme dan imperialisme Belanda di Indonesia mengalami transformasi dari dominasi ekonomi oleh VOC ke bentuk kolonialisme politik yang lebih terstruktur setelah VOC dibubarkan. Awalnya, VOC memonopoli perdagangan rempah-rempah dan mengeksploitasi sumber daya lokal demi keuntungan Belanda. Setelah diambil alih langsung oleh pemerintah Belanda, penjajahan semakin sistematis melalui kebijakan seperti Sistem Tanam Paksa dan Politik Etis. Meskipun Politik Etis membuka peluang pendidikan bagi kaum pribumi, kebijakan tersebut tetap lebih menguntungkan kepentingan kolonial dan memperburuk kondisi sosial ekonomi rakyat.

Akibatnya, kolonialisme Belanda meninggalkan warisan yang kompleks dan merugikan, munculnya struktur sosial yang diskriminatif dengan stratifikasi rasial, serta eksploitasi ekonomi yang menyebabkan kemiskinan berkepanjangan dan menghambat pertumbuhan industri lokal. Ketergantungan terhadap sistem ekonomi kolonial ini berdampak jangka panjang dan memengaruhi arah pembangunan Indonesia bahkan setelah meraih kemerdekaan.

Daftar Pustaka

- Aulia, C., Negeri, I., & Utara, S. (2023). *T i p s*. 1(2), 104–116.
- Barat, P. B. (2024). *Transformasi masyarakat indonesia pada masa penjajahan bangsa barat*. 2, 71–79.
- Basri, M., Ayu, S. N., Nabilla, G., & Berutu, S. L. (2024). Background to the Arrival of the Dutch, VOC, Dutch East Indies. *EDUCTUM: Journal Research*, 3(1), 21–26.

- <https://doi.org/10.56495/ejr.v3i1.443>
- Djazilan, M. S. (2018). Pendidikan Islam Informal Pada Kelas Menengah Muslim di Surabaya (Studi Tentang Sosialisasi dan Internalisasi Nilai Keislaman Melalui Forum Dakwah Keagamaan di Surabaya). *Disertasi*, 1–259.
- Emeh, I. E. J. (2012). A Discourse on Andre Gunder Frank's Contribution to the Theory and Study of Development and Underdevelopment; its Implication on Nigeria's development situation. *Greener Journal of Biological Sciences*, 2(3), 052–065. <https://doi.org/10.15580/gjbs.2012.3.102712158>
- Erniwati, E. (2019). Identitas Etnis Tionghoa Padang Masa Pemerintah Hindia Belanda. *Patanjala: Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 11(2), 185. <https://doi.org/10.30959/patanjala.v11i2.482>
- Erowati, R., & Bahtiar, A. (2011). o | *Sejarah Sastra Indonesia*. 74.
- Ghazali, A., & Daulay, S. P. (2006). Korupsisumberkehancuran. 5(2), 326–332.
- Hasibuan, reni ria armayani. (2018). *Buku Ajar Perekonomian Indonesia*. 443.
- Kurniawan, A., Prameswari, A., & Ekwandari, Y. S. (2022). Irigasi dan Pendidikan Politik Etis di Kota Metro. *The Indonesian Journal of Social Studies*, 6(2), 40–47.
- Lenin, V. I. (2013). Imperialism, the highest stage of capitalism. *Third World Urbanization*, 29–36. <https://doi.org/10.4324/9780203717349>
- Novriyanto, Y., Apriyana, S. B., & Komariyah, S. (2023). Pengaruh Kebijakan Politik Etis Terhadap Perkembangan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, 1(1), 88–94. <https://doi.org/10.58540/jipsi.v1i1.17>
- Nurchayanti, E. A. S. (2023). Determinasi Petani Dalam Hukum Agraria di Indonesia. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, 3(1), 36–50.
- Penerapan, D., & Fifo, M. (2023). 1*, 2 1,2. 18(2), 17–23.
- Pranata, R. A., Ibrahimsyah, Z., Sultani, M., & Aulia, M. (2014). Pemikiran Nasionalisme Dalam Pergerakan Nasional Di Indonesia Sebagai Titik Awal Rasa Kebangsaan Dan Persatuan Indonesia (1908-1942). *Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang*, 28–52.
- Ridhoi, R. (2021). Kosmopolitanisme Tanaman Tebu Dalam Historiografi Indonesia. *Sejarah Dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya*, 15(1), 164. <https://doi.org/10.17977/um020v15i12021p164>
- Rodi Wahyudi. (2020). Maladministrasi Birokrasi di Indonesia Dalam Perspektif Sejarah. *Jurnal Niara*, 13(1), 145–154. <https://doi.org/10.31849/niara.v13i1.3295>
- Sondarika, W. (2015). Dampak Culturstelsel (Tanam Paksa) Bagi Masyarakat Indonesia dari Tahun 1830-1870. *Jurnal Artefak*, 3(1), 59–66.
- Spinoza, E. K., Suryakusuma, K. P., Biljmer, T., & Suranto, H. (n.d.). BAB IV A . Analisis Struktur dalam Novel De Winst. 25–74.
- Supriadi, D. (2003). Guru di Indonesia. *Researchgate.Net, February*, 2.
- Tinggi, S., Ekonomi, I., & Depok, H. (2024). Dampak Kolonialisme Barat Terhadap Dunia Islam Pada Abad Ke- 17 Hingga Ke-19 : Analisis Sejarah dan Implikasi Kontemporer. 3(5), 5304–5314.